



PENDAMPINGAN PENDATAAN PERCEPATAN PENDATAAN KUSUKA DI KABUPATEN LAMONGAN



Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data akurat para pembudidaya sebagai langkah awal pendaftaran KUSUKA. Dengan terdatanya para pelaku usaha, diharapkan program bantuan, pembinaan, dan pengembangan usaha perikanan dapat tersalurkan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

KATA PENGANTAR

Laporan manajemen risiko merupakan laporan hasil penilaian risiko di lingkungan Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan. Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat 1 yang berbunyi "Bahwa pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Dengan disusunnya laporan manajemen risiko tribulan III, maka dapat dilihat gambaran risiko yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Demikian Laporan Manajemen Risiko Tribulan III Tahun 2025 disusun, semoga bermanfaat dan memberikan gambaran terkait pengelolaan risiko pada Dinas Perikanan terima kasih.



BAB.I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen risiko memiliki pengertian suatu proses indentifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya untuk menghindari serta meminimalisir atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima.

Manajemen risiko sendiri adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas suatu organisasi, manajemen risiko sendiri memiliki sebutan lain yitu sebuah cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik risiko itu sendiri sudah diketahui ataupun belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko tersebut kepada pihak lain atau meminimalisir efek negative terjadinya risiko.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Perikanan wajib dan perlu untuk melalukan menjemen risiko guna keberhasilan dalam pencapaian indicator dan dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala sehingga dapat diketahui risiko yang terjadi serta meminimalisir efek terjadinya risiko.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Deputi Pengawasan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSDUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko disusun dengan maksud untuk memberikan informasi terkait risiko bagi organisasi sehingga oragnaisasi dapat melakukan langkah-langkah preventif atau kuratif dalam penganggulangan terjadinya risiko pada pelaksanaan program dan

kegiatan organisasi. Sedangkan tujuan penerapan manajemen risiko dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengelola risiko dalam pencapaian sasaran strategis organisasi pemerintah;
2. Meningkatkan peluang organisasi dalam pencapaian target indicator kinerja;
3. Mendorong terciptanya manajemen proaktif, solutif, dan antisipatif;
4. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan organisasi berdasarkan data risiko yang akan terjadi.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam pengelolaan manajemen risiko pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumberdaya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan kegiatan yang akan dilakukan pengelolaan risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan;
- Koordinasi dan Komunikasi.

BAB.II RENCANA DAN REALISASI
KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO
PERANGKAT DAERAH

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III TAHUN 2025

Dalam pencapaian indicator kinerja strategis Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan yang terbagi menjadi 4 indikator kinerja strategis tentunya terdapat risiko strategis yang harus dikelola yaitu :

1. Penurunan produksi perikanan tangkap diakrenakan fishing ground semakin jauh, belum optimalnya penyediaan dan penjaminan sarpras penangkapan ikan
2. Penurunan produksi perikanan budidaya dikarenakan bencana banjir, hama penyakit ikan, dan penggunaan benih kurang berkualitas
3. Penurunan indeks harga yang diterima oleh pelaku usaha perikanan akibat biaya produksi tinggi, kurangnya diversifikasi produk olahan hasil perikanan, dan masih terbatasnya akses wilayah pemasaran produk perikanan Kabupaten Lamongan yang belum memiliki jangkauan pemasaran secara maksimal.

Sedangkan dalam pencapaian kinerja operasional terdapat beberapa risiko yang sudah diidentifikasi yaitu :

1. Risiko fraud dalam alur pelayanan penerimaan PAD tempat pelelangan ikan;
2. Adanya kelompok pelaku usaha perikanan yang tidak dapat mengakses permodalan dan peningkatan manajemen kualitas kelompok;
3. Masih terdapatnya penggunaan alat tangkap yang dilarang dan belum ramah lingkungan;
4. Keterbatasa pagu anggaran;
5. Realisasi program dan kegiatan belum sesuai target yang ditetapkan;
6. Adanya Risiko Kemitraan yang harus dikelola.

Dalam pencapaian kinerja baik itu kinerja strategis maupun operasional, Dinas Perikanan telah menyusun kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada triwulan III sebagai berikut :

KERTAS KERJA RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2025

TRIBULAN III

No.	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	<i>Risiko Strategis :</i>					
1	Sosialisasi dan pemberian peta alur jalur penangkapan ikan (WPP) Perairan Kabupaten Lamongan dan penangkapan ikan terukut	Berita acara pelaksanaan kegiatan dan penerimaan materi serta peta	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret, Agustus 2025	Maret	
2	Optimalisasi pengawasa sumberdaya perikanan melalui kegiatan patrol rutin dan pendampingan berkerjasama dengan penyuluhan perikanan terkait kepatuhan terhadap perizinan	Dokumen hasil berita acara pemeriksaan dan Pelaksanaan Pengawasan	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan	Maret, Juli, September	Maret, Juli	
3	Koordinasi dengan BMKG Juanda	Dokumen peta prakiraan cuaca	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret, Juli, September	Maret, Juli	
4	Pembinaan dan Pemantauan Lingkungan Budidaya dan Lab.Kesehatan Ikan Keliling	Uji Sample Kualitas Air dan Kesehatan Ikan dan Hasil Pengujian	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Maret, Juli, September	Maret, Juli	

No.	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
5	Optimalisasi dan peningkatan bantuan sarpras produksi perikanan	okumen proposal penerima Hibah, dan SKT Kelompok	Kepala Dinas Perikanan	Maret, Juli, September	Maret,Juli	
	Risiko Operasional :					
1	Penyediaan bantuan berdasarkan dokumen perencanaan usulan masyarakat	Input usulan masyarakat melalui SIPD	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi	Januari	Januari	
2	Pembinaan dan pendampingan administrasi kelompok	Laporan pelaksanaan kegiatan pendampingan kelompok	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	Maret, Juli, September	Maret,Juli	
3	Sosialisasi pemahaman terhadap alur SOP pelayanan TPI	Evaluasi kepatuhan penerapan pelayanan SOP Pelayanan TPI	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala UPT.TPI	Maret, Juli, September	Maret,Juli	
4	Optimalisasi diigital banking melalui layanan QRIS	Crosschek laporan penerimaan PAD dengan karcis retribusi	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Kepala UPT.TPI serta Bank Jatim	Maret, Juli, September	Maret,Juli	
5	Optimalisasi pemberian alat pengganti ramah lingkungan	Proposal Usulan kelompok dan SKT Kelompok	Kepala Dinas Perikanan	Maret, Juli, September	Maret,Juli	

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III TAHUN 2025

Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan pada tribulan III telah melaksanakan beberapa kegiatan pengendalian yang dijadwalkan terlaksana pada tribulan III yang dapat dijelaskan melalui kertas kerja sebagaimana berikut :

FORMULIR KERTAS KERJA PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP
DINAS PERIKANAN KABUPATEN LAMONGAN

TRIBULAN II

No.	"Risiko" Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	Risiko Strategis :									
1	Fishing Ground Semakin Jauh,Ketaatan terhadap alur penangkapan ikan	RST 01	Maret	Penangkapan ikan berlebihan (Overfishing) dan kerusakan terumbu karang	Biaya Operasional Tinggi		Sosialisasi dan pemberian peta alur jalur penangkapan ikan (WPP) Perairan Kabupaten Lamongan dan pemberian bantuan konverter mesin kapal	Maret,Agustus	Maret	-
2	Banjir	RSB 01	Maret	Curah Hujan Tinggi	Gagal Panen/Panen Berkurang		Koordinasi dengan BMKG Juanda	Maret,Juli,Sept ember	Maret,Juli	Banjir Wil.Bonoro wo (Turi)
3	Hama Penyakit Ikan,Ketersediaan Sarpras Budidaya	RSB 03	Maret	Kurangnya pengetahuan pengelolaan lingkungan perikanan budidaya	Gagal Panen/Panen Berkurang		Monev dan Lab.Kesehatan Keliling	Maret,Juli,Sept ember	Maret,Juli,	Terdapat Serangan HPI di Wil.Glagah dan Karangbina ngun

No.	"Risiko" Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
4	Kurangnya diversifikasi/nilai tambah produk hasil perikanan,Kurangnya akses pemasaran produk perikanan	RSK 01	Maret	Kurangnya Pengetahuan Terhadap Diversifikasi Produk Olahan Hasil Perikanan	Penurunan angka indeks harga yang diterima		Fasilitasi Pelatihan dan Pemasaran Produk Olahan Hasil Perikanan	Mei	Sudah terlaksana	

C. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hasil hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menjadikan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko belum ada.

D. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring dapat diketahui bahwa pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan pada tribulan III sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan target rencana pelaksanaan namun perlu adanya penyesuaian metode pengendalian dengan realita pelaksanaan kegiatan terkait .

E. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian terhadap risiko pada tribulan III sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan

